



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM CIREBON

TRIWULAN IV

2
0
2
5



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Cirebon Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja setiap entitas atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam PK dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Stasiun KIPM Cirebon ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan masyarakat dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Landasan penyusunan LKj adalah Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 dan Target Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 beserta realisasinya. Secara umum, pada Tahun 2025 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai dengan kategori **Baik dan Istimewa**.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi, serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Cirebon, 15 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Cirebon,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

R. Rudi Barmara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Cirebon dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Badan KIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2025, Stasiun KIPM Cirebon semula mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dengan 15 IKU, namun mulai triwulan IV menjadi 3 Sasaran Kegiatan dan 15 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen revisi terakhir Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Sampai dengan periode 31 Desember 2025, Stasiun KIPM Cirebon telah mengukur tiga Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) dengan 15 IKU tersebut. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian skor kinerja IKU Tahun 2025 adalah **113,48**. Secara keseluruhan skor kinerja IKU Tahun 2025 sebesar **113,48** atau masuk dalam kriteria **Istimewa** (biru), yaitu sebanyak 15 IKU yang diukur telah mencapai/melebihi target.

Tabel 1. Capaian IKU Stasiun KIPM Cirebon yang diukur pada akhir periode Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Capaian 2025	%
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					110,25	
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	100	120
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	99,23	120

	IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	100
	IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	200	101,01
S.02		Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar					120	
	IKS.02.1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	93,89	120
	IKS.02.2	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	91	120
S.03		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincih dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					108,39	
	IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	93,86	102,02
	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	92,5	120
	IKS.03.3	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	86,56	105,56
	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	88,2	102,56

	IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	100	118
	IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	100	120
	IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	83,05	118
	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,63	108,05

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.585.116.904,00 atau 97,40% dari pagu anggaran revisi yang dikelola yaitu sebesar Rp9.841.258.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp256.141.096,00 atau 2,60%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 93,86.

Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh Penanggung Jawab Indikator Kinerja dan Tim Manajemen Kinerja agar melakukan pemantauan atau evaluasi capaian kinerja organisasi tahunan. Selain itu komitmen dan tanggung jawab secara bersama baik pimpinan maupun seluruh pegawai lingkup Stasiun KIPM Cirebon diharapkan dapat mendukung kinerja BPPMHKP yang lebih baik lagi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan UPT yang nomenklatur **semula Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Cirebon menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP) Cirebon** disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dalam satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi sarana untuk menilai tingkat pencapaian kinerja UPT secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai unit kerja operasional, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelayanan teknis, antara lain pengujian laboratorium, inspeksi, sertifikasi, dan pengawasan di lapangan. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada kebijakan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan dinamika perdagangan, tuntutan pasar, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam rangka menjamin mutu dan keandalan layanan publik, Stasiun KIPM Cirebon secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu berbasis standar internasional, khususnya ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian dan/atau ISO/IEC 17020 untuk lembaga inspeksi, sesuai dengan ruang lingkup tugas UPT. Penerapan standar tersebut menjadi dasar dalam memastikan kompetensi personel, validitas metode, ketertelusuran hasil, serta konsistensi pelayanan, sehingga mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara akuntabel.

Sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi, Stasiun KIPM Cirebon turut berperan aktif dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola internal, peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, pengelolaan risiko, serta penguatan budaya integritas dan profesionalisme aparatur.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Stasiun KIPM Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan prinsip

kepastian waktu, kejelasan biaya, kemudahan akses, serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi kinerja layanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Laporan Kinerja Tahunan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta memuat analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Cirebon didukung oleh Kepala UPT, empat orang Ketua Tim Kerja PNS, 20 orang Pejabat Fungsional Tertentu, dua orang pegawai JFU, tiga orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sembilan orang PPPK Paruh Waktu, dan satu orang PJLP.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM CIREBON

Arah kebijakan UPT BPPMHKP ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan KKP, khususnya dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta meningkatkan kepercayaan pasar domestik dan internasional. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu berbasis risiko, peningkatan kualitas layanan teknis, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Dalam konteks operasional, arah kebijakan UPT diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan pengawasan lapangan melalui penerapan standar mutu, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan ini juga sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa.

Arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan pelaksanaan layanan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, UPT BPPMHKP berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Kontribusi tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja UPT, antara lain peningkatan jumlah layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang memenuhi standar mutu, kepastian waktu layanan sesuai standar pelayanan, serta cakupan pengawasan di wilayah kerja. Pelaksanaan kinerja UPT tersebut mendukung peningkatan akses pasar, perlindungan kepentingan pelaku usaha dan konsumen, serta penguatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN.

Arah dan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Beberapa kebijakan BPPMHKP, antara lain : (1) menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan; (2) mengendalikan dan mengawasi mutu dan hasil kelautan dan perikanan; (3) menjadi otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (4) mengedepankan budi daya perikanan. BPPMHKP juga berperan dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan, dengan strategi menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU). SISJAMU dilakukan sejak pra produksi hingga pemasaran.

Strategi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan oleh :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan
2. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dengan melakukan inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan mutu hasil perikanan melalui UPT.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian mutu hasil perikanan, antara lain: memastikan bahan baku yang digunakan berkualitas, memastikan proses produksi berjalan sesuai standar, memastikan produk akhir memenuhi standar keamanan konsumsi, memastikan

produk akhir aman untuk dikonsumsi, melakukan monitoring kesegaran ikan. Mutu ikan yang baik dapat meningkatkan keuntungan ekonomi bagi nelayan dan pedagang.

C. DASAR HUKUM

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPMHKP.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Sampai dengan 31 Desember 2025, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPT lingkup BPPMHKP belum terbit, sehingga dalam masa transisi ini UPT BPPMHKP masih melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2025 SOTK UPT BPPMHKP telah berubah nomenklatur menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Cirebon sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025, yang mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, UPT menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
5. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
6. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

E. AGENDA STASIUN KIPM CIREBON

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. KKP melalui BPPMHKP dan UPT-nya, melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer;
2. Pengendalian dan pengawasan mutu *pasca* panen;
3. Manajemen mutu; dan
4. Dukungan Manajemen.

F. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPMHKP.
4. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan Kepala BPPMHKP sebagaimana Revisi terakhir tanggal 8 Desember 2025.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 Nomor SP DIPA- 032.13.2.649732/2025, tanggal 2 Desember 2024.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai capaian kinerja yang telah dicapai Tahun Anggaran 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja TA 2025.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Stasiun KIPM Cirebon dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala Stasiun KIPM Cirebon dengan Kepala BPPMHKP pada TA 2025.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang diukur : Januari s.d. Desember 2025
2. Waktu pengukuran : 2 s.d. 10 Januari 2026

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (Matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Desember 2025.

K. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan laporan merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang :
 - Capaian Kinerja Organisasi (membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan; membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada); analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Realisasi Anggaran (Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja);
- d. Bab IV – Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Bab V - Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 s.d. 2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Renstra Tahun 2025 - 2029 menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk menyusun usulan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis Matriks Peran Hasil (MPH) di lingkungan BPPMHKP.

Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, dan sejahtera. Visi dan misi ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP tahun 2025 - 2029.

1. Visi

Visi Stasiun KIPM Cirebon “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” yang mengacu pada visi BPPMHKP dan KKP yaitu mendukung terwujudnya visi - misi Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu: terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk “mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut dalam rangka mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain.

2. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 - 2029, yaitu: (1) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; (2) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (3) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang

berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

3. Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT BPPMHKP yang mendukung/bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan KKP yaitu dengan :

- a. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
- b. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
- c. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

4. Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 - 2029, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Cirebon dari program yang dilaksanakan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Mengacu Sasaran Kegiatan BPPMHKP, pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Cirebon menetapkan 3 sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar; dan

- c. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup Pengendalian Mutu Produksi Primer, Produksi Pascapanen, dan Manajemen Mutu. Adapun rincian output TA 2025 adalah:

- a. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (1 rekomendasi kebijakan);
- b. Supplies yang menerapkan CPIB pada supplier hasil perikanan (10 lembaga);
- c. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor (1 produk);
- d. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (60 produk);
- e. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (40 produk);
- f. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (25 lembaga);
- g. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (3 produk);
- h. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* (9 Lembaga);
- i. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (20 Lembaga);
- j. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan (1 kegiatan);
- k. Rekomendasi kebijakan parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan (1 rekomendasi);
- l. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (1 lembaga);
- m. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (1 lembaga); dan
- n. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi (2 produk).

2. Program Dukungan Manajemen

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama Dukungan Manajemen dengan rincian output :

- a. Layanan BMN (5 layanan);
- b. Layanan Umum (1 layanan);
- c. Layanan Manajemen SDM (2 orang);
- d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen); dan
- e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen).

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah direvisi terakhir pada tanggal 8 Desember 2025, sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)	1
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99
SK 2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71,5
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	82
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	86
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	85
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	76
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		15	Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (indeks)	3,36

Sumber : Revisi terakhir PK Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025

D. PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN KIPM CIREBON

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BPPMHKP TA 2025, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan 1 program teknis dan 1 dukungan manajemen, dengan rincian komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan
2. Validasi produk pada sektor produksi pasca panen
3. Validasi Sertifikasi Produksi Primer
4. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor
7. Peningkatan kompetensi inspektur mutu
8. Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji
9. Penerapan Standar Metode Pengujian
10. Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
11. Verifikasi Penerapan Standar *Quality Assurance*
12. Layanan Umum dan Rumah Tangga
13. Gaji dan Tunjangan
14. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
15. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
16. Layanan Manajemen Keuangan

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Cirebon telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai IKU dan target waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun KIPM Cirebon dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online *www.kinerjaku.kkp.go.id*. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Cirebon Nomor B.27/SKIPM.CRB/KP.440/I/2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Cirebon.

Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara akumulasi dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU.
4. Status indeks capaian IKU dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 1. Rentang penilaian capaian kinerja

Sesuai dengan MPH Tahun 2025, Sasaran Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui capaian **15 IKU** dengan target yang ditentukan sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terakhir pada tanggal 8 Desember 2025.

B. CAPAIAN KINERJA

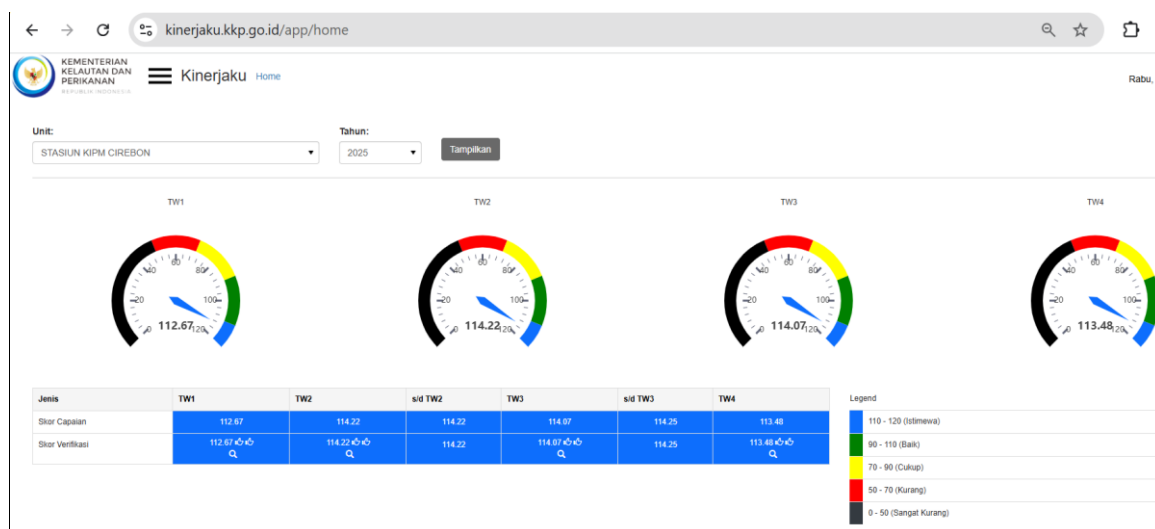
Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dari Januari sampai dengan Desember 2025. Capaian kinerja yang diukur selama Tahun 2025, target SS dan IKU yang diukur menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam Tahun 2025. Target dan realisasi SS dan IKU Tahun 2025 tersaji pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan IKU yang diukur pada Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Capaian 2025	%
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					110,25	
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	100	120
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	99,23	120

	IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	100
	IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	200	101,01
S.02		Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar					120	
	IKS.02.1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	93,89	120
	IKS.02.2	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	91	120
S.03		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					108,39	
	IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	93,86	102,02
	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	92,5	120
	IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	86,56	105,56
	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	88,2	102,56
	IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	100	118
	IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	100	120
	IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	83,05	118
	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,63	108,05

Seluruh IKU dari 3 Sasaran Strategis (SS) Tahun 2025 telah dilakukan pengukurannya menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat disampaikan bahwa *dashboard* capaian kinerja IKU pada Tahun 2025 sebagaimana Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2025

Pada gambar tersebut, nilai capaian kinerja IKU Tahun 2025 mencapai nilai **113,48**; sebagaimana capaian kinerja IKU secara keseluruhan ditunjukkan dengan skor kinerja sebesar **113,48** yang masuk dalam kriteria **Istimewa** (biru). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 15 IKU yang diukur pada Tahun 2025 telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja SS yang dihasilkan dari kinerja masing – masing IKU yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

SK 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, dicapai dengan 4 IKU, yaitu :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%);
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%);

3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi);
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%).

IKU 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Target persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dalam satu tahun anggaran sebesar 70% dengan rincian target sertifikasi CBIB pada Pembudidaya ikan sebanyak 3 sertifikat, CPIB pada pembenihan ikan sebanyak 3 sertifikat, CPPIB sebanyak 2 sertifikat, CPOIB/CDOIB sebanyak 2 sertifikat, dan CPIB pada kapal perikanan sebanyak 20 sertifikat.

$\text{Formula perhitungan IKU} = \% X = (A+B+C+D+E+F)/x_n * 100\%$

Keterangan :

% X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
 F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Capaian IKU 1 Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian % ^{*)}
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	-	-	-	100	70	100	120	70	120

Sumber : Laporan kegiatan Sertifikasi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, dan CPIB di atas kapal lingkup Stasiun KIPM Cirebon pada Tahun 2025

^{*)} angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada Tahun 2025, persentase sertifikasi sektor produksi primer yang diterbitkan sebesar 100% dari total 55 berkas permohonan dengan rincian 16 permohonan sertifikasi CBIB, 2 permohonan CPIB pembenihan, dan 37 permohonan sertifikasi CPIB Kapal. Oleh karena itu atas ketiga jenis kegiatan sertifikasi tersebut, persentase hasil kelautan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Cirebon adalah $(55/55) \times 100\% = 100\%$, maka capaian IKU 1 terhadap target tahunan sebesar $(100/70) \times 100\% = 143\%$ (dengan konversi dalam aplikasi kinerjaku menjadi maksimal 120%).

Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 120% tersebut disebabkan mulai meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif baik pasar dalam negeri maupun ekspor.

Capaian kinerja IKU 1 ini jika dibandingkan dengan satker yang lain, Stasiun KIPM Cirebon termasuk UPT yang dapat melebihi target jumlah sertifikasi mutu produksi primer sebesar 55 dari target 30 sertifikasi dan ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi atas capaian IKU organisasi BPPMHKP.



Gambar 3. Kegiatan inspeksi dalam rangka sertifikasi CBIB dan CPIB di atas Kapal

Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi/ sosialisasi pemahaman sistem jaminan mutu sebagai syarat dasar dalam usaha bidang perikanan dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, pengukuran terhadap IKU ini sudah ada sejak Tahun 2024 (akibat perubahan IKU organisasi BPPMHKP) dan dilanjutkan pada periode Tahun 2025 – 2029, dengan target Tahun 2025 sebesar 70%. Oleh karena itu, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Tahun 2029), maka kondisi capaiannya sama dengan 120%.

Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan pengendalian hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer s.d. triwulan IV sebesar Rp118.646.932,00 atau 99,85% dari pagu revisi terakhir senilai Rp118.200.000,00.

IKU 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%);

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi

Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Adapun target persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon selama satu tahun anggaran ini sebesar 70%, dengan rincian : target sertifikasi HACCP sebanyak 50 ruang lingkup dan SKP sebanyak 100% permohonan ditindaklanjuti sertifikasinya.

Formula perhitungan IKU ini adalah :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

dengan keterangan :

- % X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
 B = Persentase SKP yang diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
 xn= Jumlah dari unsur pembentuk

Capaian IKU 2 Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian % *)
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM (%)	-	-	-	-	100	70	100	120	70	120

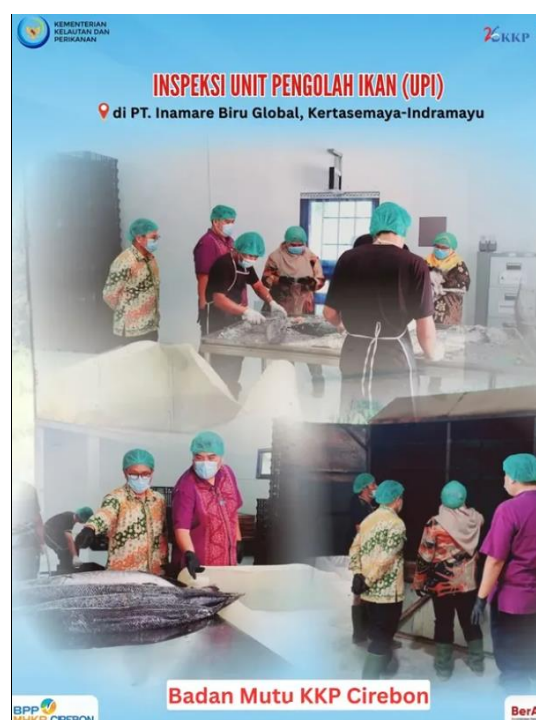
Sumber : Laporan hasil kegiatan Sertifikasi HACCP dan SKP Tahun 2025.

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada Tahun 2025, persentase sertifikasi sektor pascapanen yang diterbitkan sebesar 100% yang terdiri dari 133 sertifikasi SKP dari 133 permohonan, dan 86 sertifikasi Ruang Lingkup HACCP dari target 50 ruang lingkup. Oleh karena itu atas kedua komponen tersebut, persentase hasil kelautan perikanan pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah 100%, sehingga capaian IKU 2 sebesar $(100 / 70) \times 100\% = 142,85\%$ (dikonversi aplikasi kinerja menjadi ~120%).

Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 120% tersebut disebabkan meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi/sosialisasi pemahaman sistem jaminan mutu sebagai syarat dasar dalam usaha bidang perikanan dari tingkat hulu sampai tingkat hilir.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, pengukuran terhadap IKU ini sudah ada sejak Tahun 2024 (akibat perubahan IKU organisasi BPPMHKP) dan dilanjutkan pada periode Tahun 2025 – 2029, dengan target Tahun 2025 sebesar 70%. Oleh karena itu, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Tahun 2029), maka kondisi capaiannya sama dengan 120%. Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Pascapanen triwulan IV sebesar Rp43.708.000,00 atau 97,57% dari pagu revisi terakhir senilai Rp44.797.000,00.



Gambar 4. Kegiatan surveilen dan inspeksi sertifikasi HACCP di UPI

Capaian kinerja IKU 2 ini jika dibandingkan dengan satker lain, Stasiun KIPM Cirebon termasuk UPT BPPMHKP yang dapat melebihi target jumlah sertifikasi HACCP sebesar 89 dari target 50 ruang lingkup dan ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP.

IKU 3 Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)

Pengawasan mutu dimaksud meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, suplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah RI yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya. Kegiatan pengawasan mutu periode triwulan IV terlaksana di 1 lokasi sesuai target yaitu pada bulan Juli s.d. September 2025 di Kota Cirebon dengan 2 lokus (pasar tradisional dan pasar modern).

Formula perhitungan capaian IKU 3 adalah =

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A : Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI;

B : Jumlah kab/kota yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Capaian IKU 3 pada Tahun 2025 seperti pada Tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025 - 2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian % ^{*)}
Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	2	3	3	3	100%	1	1	100%	1	100%

Sumber : Rekap hasil kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2025

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pascapanen pada Tahun 2025 seluruhnya adalah $= (1/1) \times 100\% = 100\%$; sehingga capaian realisasi IKU $= (100 / 70) \times 100\% = 120\%$.



Gambar 5. Kegiatan pengawasan mutu di beberapa lokasi di lingkup Kota Cirebon

Keberhasilan atas pencapaian sesuai target sebesar 120% didukung karena lebih intensifnya kegiatan monitoring dan surveilen di sentra-sentra penyediaan produk hasil perikanan domestik. Upaya nyata yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring ikan sehat dan bermutu di sentra penyediaan pangan sehat domestik secara berkala.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, pengukuran terhadap IKU ini sudah ada sejak Tahun 2024 (akibat perubahan IKU organisasi BPPMHKP) dan dilanjutkan pada periode Tahun 2025 – 2029, dengan target Tahun 2025 sebesar 1 lokasi. Oleh karena itu, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Tahun 2029), maka kondisi capaiannya sama dengan 100%. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik dilaksanakan sesuai juknis tanpa anggaran khusus dalam RKA K/L TA 2025.

Capaian kinerja IKU 3 ini jika dibandingkan satker lain, Stasiun KIPM Cirebon termasuk UPT BPPMHKP yang dapat melebihi target jumlah 1 lokus sentra-sentra penyediaan produk hasil perikanan domestik dengan melaksanakan pengawasan pada beberapa titik sampling di Kota Cirebon yaitu Pasar Kanoman dan tempat pendaratan ikan di PPN Kejawan, dan ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP.

IKU 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Formula perhitungan rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah $(x) \% =$

$$\frac{A - B}{A}$$

dengan keterangan :

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Capaian IKU 4 pada Tahun 2025 seperti pada Tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Target (%)	Capaian %
Rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100	99,70	99,76	100	99,99	99	100	101	99	101

Sumber : hasil pengolahan data ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Cirebon

^{*)} angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Jumlah permohonan sertifikasi ekspor hasil perikanan pada Tahun 2025 sebanyak 823 Sertifikat Mutu Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) dan tidak terdapat notifikasi kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor, baik negara mitra maupun negara non mitra sehingga realisasi persentase ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 100% dari target 99%. Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 101% tersebut disebabkan kehati-hatian eksportir dalam memenuhi persyaratan ekspor terkait penanganan produk oleh negara tujuan ekspor baik secara administrasi maupun *quality controll* produk. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan ekspor baik secara administrasi maupun *quality controll* produk.

FOTO

Gambar 6.

Pada rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, pengukuran terhadap IKU ini sudah ada sejak Tahun 2024 (perubahan IKU organisasi BPPMHKP) dan dilanjutkan pada periode Tahun 2025 – 2029, dengan target Tahun 2025 sebesar 99%. Oleh karena itu, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Tahun 2029), maka kondisi capaiannya sama dengan 101%.

Capaian kinerja IKU 4 ini jika dibandingkan satker lain, Stasiun KIPM Cirebon termasuk UPT BPPMHKP yang dapat melaksanakan penerbitan sertifikat mutu dengan 2 dari 832 sertifikat mutu

yang diterbitkan merupakan sertifikat mutu ekspor udang/olahan berbahan baku udang ke USA yang telah dinyatakan bebas Cesium-137. Hal tersebut selaras dengan prioritas Menteri KP bahwa ekspor udang dari Indonesia ke USA dapat dijamin mutunya dan bebas radioaktif, sekaligus ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP. Dalam rangka pelayanan jasa Sertifikat mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, Stasiun KIPM Cirebon tidak tersedia dukungan anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

SK 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dicapai dengan satu IKU, yaitu :

5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai);
6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai).

IKU 5 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai);

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025. Penilaian ini menggambarkan sejauh mana laboratorium memenuhi persyaratan manajemen mutu dan memenuhi persyaratan teknis pengujian/kalibrasi, untuk menjamin kompetensi, ketelusuran hasil uji, dan keandalan data. Nilai dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar penilaian. Laboratorium dengan nilai pemenuhan tinggi menunjukkan bahwa sistem mutu berjalan efektif, hasil uji dapat dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan pemangku kepentingan meningkat. ISO/IEC 17025 merupakan standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Formulasi perhitungan IKU 5 yaitu :

$$X = \frac{(X1 + X2 + X3 + Xn)}{n}$$

X = nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (rata-rata)

X1, X2, X3,Xn = Nilai tingkat pemenuhan ke 1,2,3,...n

n = banyaknya tingkat pemenuhan

Capaian IKU 5 Tahun 2025 secara detil seperti pada tabel berikut.

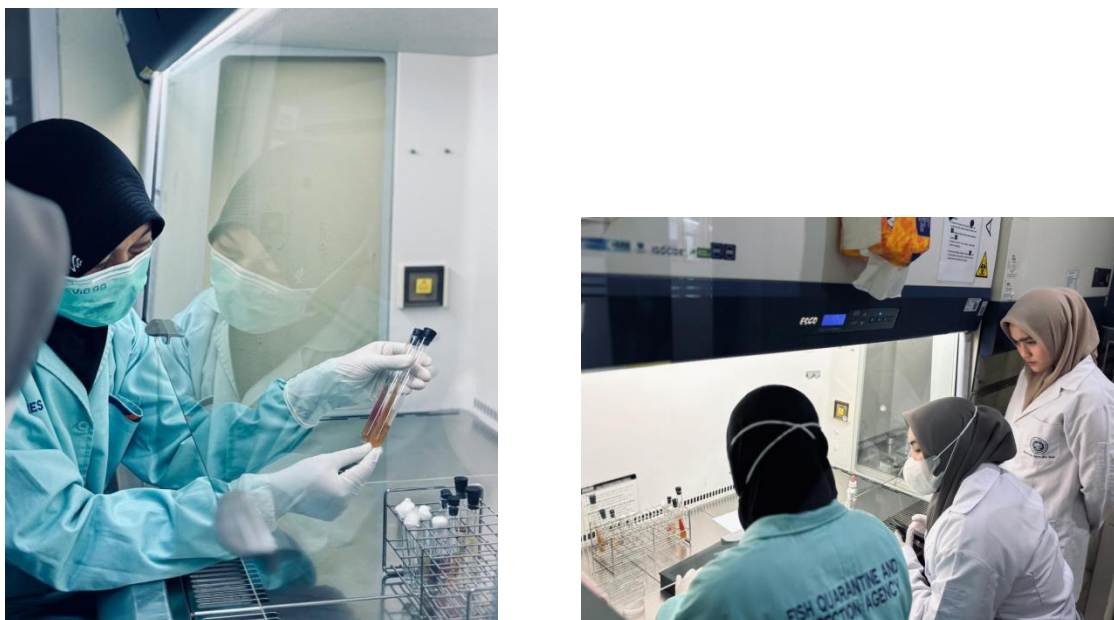
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 5 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025 (Nilai)			Renstra Tahun 2025 - 2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian ^{*)} %	Target	Capaian ^{*)} %
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	-	-	-	-	83,1	75	93,89	120	75	120

Sumber : ^{*)} angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Laporan Monev Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKU 5 atas target Tahun 2025 sebesar 120% (= 93,89/75 *100%) dan capaian atas target tahunan sebesar 120%. Keberhasilan capaian kinerja IKU 5 ini diperoleh dari telah dilaksanakannya verifikasi langsung oleh tim Pusat Manajemen Mutu pada tanggal 21-24 April 2025. Beberapa faktor keberhasilan capaian tersebut adalah komitmen pimpinan sebagai Manajer Puncak, personel laboratorium yang memiliki kompetensi yang memadai, dokumentasi sistem mutu yang lengkap dan terkendali, penerapan audit internal dan tinjauan manajemen yang rutin, proses pengujian dilaksanakan menggunakan metode yang tervalidasi/verifikasi, identifikasi dan pengendalian risiko mutu yang dilakukan secara proaktif, laboratorium yang konsisten memenuhi persyaratan akreditasi ISO/IEC 17025 serta regulasi teknis yang berlaku.



Gambar 7. Kegiatan pengujian di Laboratorium Stasiun KIPM Cirebon

Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain menerapkan sistem manajemen mutu bukan hanya bersifat administratif, tetapi diimplementasikan secara serius dalam kegiatan laboratorium sehari-hari, serta melakukan *continuous improvement*. Pada Tahun 2025, realisasi anggaran atas Penguatan Sistem Manajemen Mutu Rp273.590.575,00 atau 99,75% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp274.280.000,00.

Pada rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, pengukuran terhadap IKU ini sudah ada sejak Tahun 2024 (perubahan IKU organisasi BPPMHKP) dan dilanjutkan pada periode Tahun 2025 – 2029, dengan target nilai Tahun 2025 sebesar 75%. Oleh karena itu, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Tahun 2029), maka kondisi capaiannya sama dengan 120%.

Capaian kinerja IKU 5 ini jika dibandingkan satker lain, Stasiun KIPM Cirebon termasuk laboratorium yang dapat menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium secara integrasi dengan nilai tertinggi yaitu 93,89 sesuai dengan Nota Dinas Kapus MM Nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026, hal ini sekaligus ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP.

IKU 6 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap LI dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020, yang dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian

terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Nilai pemenuhan ini merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi dalam memenuhi persyaratan standar yang berlaku (ISO/IEC 17020), yang mencakup aspek manajerial dan teknis, guna menjamin ketidakberpihakan, kompetensi, serta keandalan hasil inspeksi. Nilai ini diperoleh melalui proses evaluasi yang meliputi penelaahan dokumen sistem mutu, pelaksanaan audit/asesmen lapangan, kepatuhan terhadap prosedur inspeksi, serta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi perbaikan. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Formulasi perhitungan IKU 6 yaitu :

$$X = \frac{(X1 + X2 + X3 + \dots + Xn)}{n}$$

X = persentase nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi (rata-rata)
 X1, X2, X3,Xn = Nilai tingkat pemenuhan ke 1,2,3,...n
 n = banyaknya tingkat pemenuhan

Capaian IKU 6 pada Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025 (Nilai)			Renstra Tahun 2025 - 2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian*) %	Target	Capaian*) %
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	-	-	-	-	83,1	75	91	120	75	91

Sumber : *) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id
 Laporan Monev Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Capaian IKU 6 pada Tahun 2025 sebesar 120% (= 91,00/75 *100%) dan capaian atas target tahunan sebesar 120%. Nilai capaian kinerja IKU 6 ini diperoleh dari telah dilaksanakannya verifikasi langsung oleh Tim Pusat Manajemen Mutu pada tanggal 21-24 April 2025. Beberapa faktor keberhasilan capaian tersebut adalah komitmen manajemen puncak, Inspektur Mutu/

Asisten IMUT yang telah memiliki kualifikasi, pelatihan, dan sertifikasi sesuai ruang lingkup inspeksi, pengendalian dokumen dan rekaman berjalan efektif (versi terkendali), temuan audit internal ditindaklanjuti melalui tindakan korektif dan pencegahan yang terukur, pemeliharaan sarana prasarana terdokumentasi, menggunakan *checklist*, form, dan laporan inspeksi yang seragam.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain menerapkan sistem manajemen mutu bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam Kegiatan Inspeksi, serta melakukan *continuous improvement*.



Gambar 8. Kegiatan Inspeksi oleh Inspektur Mutu/ Asisten IMUT di Unit Pengolahan Ikan lingkup wilayah kerja Stasiun KIPM Cirebon

Pada rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, pengukuran terhadap IKU ini sudah ada sejak Tahun 2024 (perubahan IKU organisasi BPPMHKP) dan dilanjutkan pada periode Tahun 2025 – 2029, dengan target nilai Tahun 2025 sebesar 75%. Oleh karena itu, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah (Tahun 2029), maka kondisi capaiannya sama dengan 120%. Realisasi anggaran atas Penguatan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 mencapai Rp26.812.396,00 atau 99,97% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp26.820.000,00.

Capaian kinerja IKU 6 ini jika dibandingkan satker lain, Stasiun KIPM Cirebon termasuk lembaga inspeksi yang dapat menerapkan sistem manajemen mutu LI secara integrasi dengan sangat baik dengan nilai 91 (nilai > 90) sesuai dengan Nota Dinas Kapus MM Nomor

B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026, hal ini sekaligus ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP.

SK 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon

7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)
9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)
10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)
11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)
13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)
14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)
15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)

IKU 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekonsiliasi LPJ, rencana kas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Periode pengukuran IKU setiap semester dan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 7 seperti pada tabel berikut.

Capaian IKU 7 pada Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025 (Nilai)			Renstra Tahun 2025 - 2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian ^{*)} %	Target	Capaian ^{*)} %
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	95,45	98,83	97,76	96,68	99,99	92	93,86	102	75	102

Sumber : Aplikasi OMSPAN KEMENKEU

Secara akumulasi, sampai dengan semester 2 TA 2025, nilai IKPA mencapai 93,86 dari target 92 atau capaian kinerja IKU 7 sebesar 102%. Keberhasilan tercapainya target tersebut disebabkan tercapainya kualitas perencanaan anggaran sebesar 96,39%; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 87,36%; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100%.



Gambar 9. Piagam Penghargaan sebagai Satker Berkinerja Terbaik (TA 2024 dan 2025 semester I)

Upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga penilaian indikator deviasi halaman III DIPA menjadi optimal. Sampai dengan akhir TA 2025 realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum dalam rangka mendukung capaian penilaian IKPA Tahun 2025 ini sebesar Rp43.469.225,00 atau 98,86% dari pagu anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp43.970.000,00.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, target IKU ditetapkan menurun dibanding Tahun 2024, yaitu 93,76 menjadi 92,00 pada Tahun 2025. Adapun capaian kinerja

secara keseluruhan dibandingkan dengan target IKPA akhir Tahun 2029 mencapai 102% dari target. Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 ini juga mendapat peringkat terbaik III sebagai Satker Berberkinerja Terbaik (Kategori Pagu Sedang) di Cirebon sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Tipe A1 Cirebon Nomor KEP-30/KPN.1306/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan terbaik I periode TA 2025 semester I dengan nilai IKPA 100, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Tipe A1 Cirebon Nomor KEP-58/KPN.1306/2025 tanggal 29 Juli 2025.

IKU 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), yaitu : Sangat Baik, apabila NKA > 90; Baik, apabila NKA >80 – 90; Cukup, apabila NKA >60 – 80; Kurang, apabila NKA >50 – 60; dan Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 8 pada Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

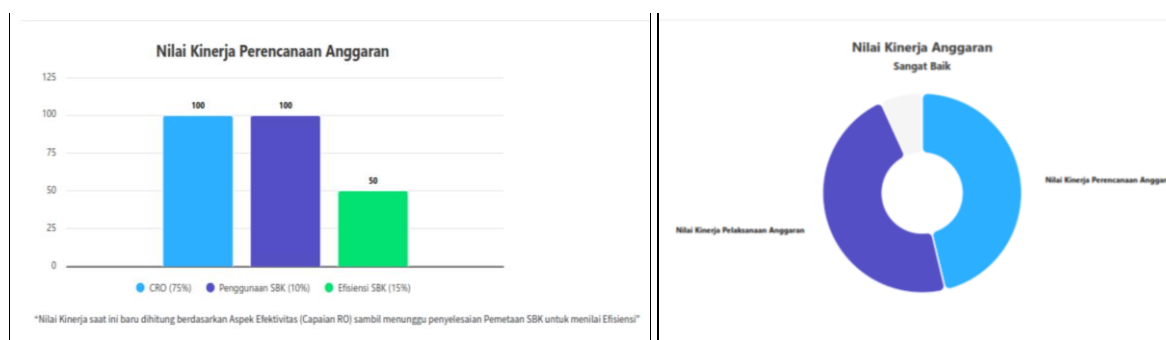
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 8 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025 (Nilai)			Renstra Tahun 2025 - 2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian ^{*)} %	Target	Capaian ^{*)} %
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	-	86,14	86,57	89,32	95	71,5	92,5	120%	71,5	120%

Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Sampai dengan akhir TA 2025, nilai kinerja perencanaan anggaran mencapai 92,5 atau capaian kinerja sebesar 120% dari target 71,5. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan optimalnya penyerapan anggaran, kesesuaian antara realisasi dan rencana anggaran, dan kepatuhan Stasiun KIPM Cirebon dalam menerapkan SBK sebagai pedoman penganggaran.

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan mengupayakan menyusun perencanaan dengan matang, tidak melakukan revisi DIPA yang dapat menghambat/menunda pelaksanaan kegiatan, dan berupaya tidak adanya deviasi halaman III DIPA. Realisasi anggaran komponen/kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran sampai dengan akhir TA 2025 sebesar Rp20.445.395,00 atau 98,30% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp20.800.000,00.



Gambar 10. Diagram Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, target IKU yang ditetapkan meningkat dibanding Tahun 2024, yaitu 71 menjadi 71,5 pada Tahun 2025. Adapun capaian kinerja secara keseluruhan dibandingkan dengan target NKA akhir Tahun 2029 mencapai 120% dari target.

Capaian IKU 8 Stasiun KIPM Cirebon tersebut dibandingkan dengan satker lain merupakan satker yang capaian NKA-nya lebih besar dari 90. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP.

IKU 9 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Formula perhitungan realisasi IKU = (Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon yang ditindaklanjuti : Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Stasiun

KIPM Cirebon) *100%. Periode pengukuran IKU tahunan dan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 9 seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU 9 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase penyelesaian temuan BPK RI lingkup UPT SKIPM Cirebon (%)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas KKP

Terhadap LK KKP dan Stasiun KIPM Cirebon TA 2024 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan oleh BPK RI, sehingga tidak terdapat rekomendasi temuan yang harus diselesaikan. Adapun atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun-tahun sebelumnya telah diselesaikan secara tuntas 100%. Keberhasilan capaian kinerja atas target tersebut didukung dengan telah dilaksanakannya tindak lanjut atas seluruh temuan kerugian negara sampai dengan saat ini sebesar 100% dengan status tuntas.

Upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain dengan konsisten melakukan sistem pengendalian intern untuk meminimalisir adanya temuan kerugian negara dan kelemahan SPI dalam pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup UPT. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, masih terdapat IKU Persentase penyelesaian temuan BPK RI lingkup Stasiun KIPM Cirebon dengan target 100%. Realisasi IKU 9 pada Tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah capaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Cirebon berkontribusi nyata atas capaian IKU organisasi BPPMHKP dan LK KKP Tahun 2024 dengan opini WTP.

IKU 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugastugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 10 pada Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 10 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Indeks profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	61,28	86,97	88,03	88,61	91,07	82	86,56	106	82	106

Sumber : IP ASN KKP yang dihitung oleh Biro SDMAO melalui website <http://ropeg.kkp.go.id>

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran capaian IKU 10 menggunakan alat bantu berbasis digital <http://ropeg.kkp.go.id> dengan capaian IP ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 86,56 dari target 82,00 sehingga capaian IKU sebesar 106%. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan proaktifnya pegawai mencari informasi dan meningkatkan kompetensinya sebagai ASN, baik secara luring maupun daring. Upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Cirebon adalah menyusun rencana peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi secara berkala. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2024), capaian tersebut mengalami peningkatan indeks, namun target berubah menjadi lebih rendah yaitu menjadi 82,00 dari target tahun sebelumnya 84,00. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan

adanya komitmen Pimpinan dalam memberikan kesempatan kepada setiap pegawainya dalam peningkatan kompetensinya untuk mendukung kinerjanya.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, target IKU ditetapkan dengan semakin meningkat setiap tahunnya yaitu mulai dari 82 s.d. 86 pada akhir Tahun 2029, namun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2024, maka target Tahun 2025 berubah menjadi 82,00. Realisasi IKU Tahun 2025 sebesar 86,56 jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 atau akhir perencanaan jangka menengah (TA 2029) sebesar 86,00, maka kondisi capaian per Tahun ini telah mencapai 101%.



Gambar 11. Kegiatan *In house training* penggunaan alat scanning Cesium-137

IKU 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi Instansi Pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi anggaran (input) atau kegiatan (output) menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai atas penilaian mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHPK. Cara menghitung capaian nilai PM SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat mitra dari Unit Eselon I, namun jika Itjen KKP tidak melakukan penilaian terhadap UPT, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh

Sekretariat BPPMHKP. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 8 seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU 11 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (nilai)	81,00	87,40	-	-	85,50	86,00	88,20	103%	86,00	103%

Sumber : LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Dalam rangka implementasi sistem AKIP, telah disusun Manual IKU, Laporan Kinerja triwulanan dan LKj Tahunan. Capaian nilai mandiri sistem AKIP senilai 88,2 atau 104% dari target nilai 86,0. Keberhasilan tersebut disebabkan pada Tahun 2025, Stasiun KIPM Cirebon berusaha memenuhi dan mengimplementasikan sistem AKIP yang terakomodir pada seluruh aspek penilaian, mencakup aspek kepatuhan dalam menyediakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi, mengukur capaian kinerja sesuai dengan pedoman, dan menyampaikan Laporan Kinerja baik kepada Pimpinan internal maupun eksternal (MENPAN dan RB melalui aplikasi ESR) secara tepat waktu.

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar anggota tim akuntabilitas UPT baik perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi, rekonsiliasi dokumen, data dan informasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon secara berkala (triwulanan dan tahunan). Sampai dengan triwulan IV (setelah revisi anggaran) tidak terdapat anggaran komponen/kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal UPT untuk menunjang kegiatan SAKIP.

Capaian Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2024. Dalam rencana jangka menengah Tahun 2025-2029, target IKU ditetapkan meningkat pada setiap tahunnya. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar anggota tim akuntabilitas UPT baik perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi rekonsiliasi dokumen, data dan informasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

IKU 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada SKIPM Cirebon dihitung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan/LHP (terbatas pada Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit s.d. triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Stasiun KIPM Cirebon yang menjadi objek pengawasan oleh sistem dalam aplikasi SIDAK KKP. Capaian IKU diukur dengan membandingkan (jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP melalui Laporan Hasil Pengawasan) x 100%. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 12 seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 12 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Capaian %
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	100	100	100	100	100	85	100	120	85	120

Sumber : Data diolah dari aplikasi SIDAK. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pencapaian IKU dilakukan pada triwulan IV dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun KIPM Cirebon dan memanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon, sehingga capaian tindak lanjut mencapai 100% dari target 85%. Adapun bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi PNBK di Stasiun KIPM Cirebon yang dilaksanakan Tim Itjen pada September 2025, telah seluruhnya *diupload* dan disampaikan ke Tim PTL Itjen melalui aplikasi pengawasan SIDAK.

Sampai dengan triwulan IV, Stasiun KIPM Cirebon mampu memanfaatkan rekomendasi hasil pengawasan dimaksud sebagai perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan informasi data dalam aplikasi SIDAK. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 118% tersebut disebabkan rekomendasi hasil pengawasan 100% telah ditindaklanjuti secara tuntas untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memperbaiki kinerja pegawai dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan, seperti menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

IKU 13 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan untuk mengukur IKU 13 Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $(\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP} / \text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}) \times 100\%$. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Perkembangan capaian IKU 13 seperti pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU 13 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP (%)	-	-	80,82	81,66	84,34	76	100	120	76	120

Sumber : Data dari aplikasi SIRUP. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Realisasi IKU 13 Stasiun KIPM Cirebon pada triwulan IV sebesar 100%, sehingga capaian IKU 13 sebesar 132% yang selanjutnya dikonversi oleh aplikasi kinerjaku menjadi 120%, sebagaimana informasi dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/II/2026, tanggal 13 Januari 2026, hal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan capaian IKU 120% tersebut disebabkan pasca efisiensi anggaran, PPK segera melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun, sehingga dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP melebihi 100%.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain melakukan upload Rencana Umum Pengadaan UPT (pasca efisien) secara tepat waktu (sebelum jadwal/akhir Desember Tahun 2025). Dalam rangka pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

IKU 14 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Tujuan Pemantauan dan Penilaian Pembangunan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 yaitu untuk : (1) mengetahui perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diseluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; (2) sebagai tahapan proses keberlanjutan komitmen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; (3) memberikan rekomendasi perbaikan dokumen pemenuhan LKE pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan memastikan bahwa indikator pembangunan Zona Integritas telah dilengkapi dengan bukti dukung memadai; (4) sebagai sumber data Capaian IKU Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BPPMHKP. Ruang lingkup Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM meliputi :

A. PENGUNGKIT (Pemenuhan dan *Reform*)

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tatalaksana
- 3) Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
- 4) Penguatan Akuntabilitas
- 5) Penguatan Pengawasan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. HASIL

- 1) Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel; dan 2) Pelayanan Publik Yang Prima

Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Penilaian capaian IKU dilaksanakan oleh Tim Penilai Sekretariat BPPMHKP. Adapun perkembangan capaian IKU 14 seperti pada tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 14 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	-	-	-	-	70	83,05	118%	70	118%

Sumber : Surat Dinas Plt.Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026

Pada triwulan IV telah dilaksanakan penilaian pemenuhan dokumen Pembangunan ZI lingkup UPT dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan nilai capaian persentase pemenuhan sebesar 83,05% dari target 70% sehingga capaian IKU sebesar 118%.

Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 118% disebabkan komitmen seluruh pegawai Stasiun KIPM Cirebon dalam mengimplementasikan budaya pembangunan ZI. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam mengimplementasikan klausul-klausul dalam seluruh area perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tidak hanya sebatas administrasi. Dalam rangka pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

Stasiun KIPM Cirebon mendapatkan peringkat ke-5 dalam pencapaian IKU ini dibandingkan dengan satker lain di lingkup BPPMHKP. Hal tersebut menunjukkan Stasiun KIPM Cirebon mampu berkontribusi dan mendukung dalam pencapaian IKU organisasi BPPMHKP.

IKU 15 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 15 seperti pada tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU 15 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra Tahun 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat layanan UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	82,98	85,37	88,66	94,68	95,32	3,36	3,63	108	3,36	108

Sumber : <https://taplink.cc/yanblik.setbppmhkp> dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUSAN) dengan alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>

Pada triwulan IV telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diprogramkan setiap triwulan menggunakan alat bantu kuesioner berbasis digital (website ptsp.kkp.go.id) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,63 dari target 3,36 sehingga capaian IKU sebesar 108%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 108% disebabkan peningkatan pelayanan publik dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam melayani masyarakat pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan prima. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran untuk alat tulis kantor dan pelayanan publik dalam rangka mendukung capaian IKU 15 ini sebesar Rp11.993.800,00 atau 99,95% dari pagu anggaran sebesar Rp12.000.000,00.

D. REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Tahun 2025 tersaji pada Lampiran 1.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU Tahun 2025 berjumlah sekitar 31 komponen/kegiatan. Sampai dengan akhir Tahun 2025, seluruh komponen/ kegiatan telah mencapai target setahun ini bahkan melampaui target sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi terakhir tanggal 8 Desember 2025. Katimja dan Penanggung Jawab kegiatan berupaya atas pelaksanaannya sehingga tidak mengganggu rencana pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian 15 IKU terbagi menjadi 3 periodik yaitu triwulanan, semesteran, dan tahunan.

E. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN TA 2025

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.585.116.904,00 atau 97,40% dari pagu anggaran revisi yang dikelola yaitu sebesar Rp9.841.258.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp256.141.096 atau 2,6%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 93,86.

F. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, Stasiun KIPM Cirebon juga dituntut untuk memperhatikan indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran negara yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud antara lain ekonomis, efisien, dan efektif. Indikator efektivitas berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Dengan mengacu pada kriteria tersebut, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Stasiun KIPM Cirebon telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien, sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Stasiun KIPM Cirebon yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan KKP, mitra kerja, dan BPPMHKP. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran juga telah melalui proses reviu yang dilaksanakan oleh BPPMHKP dan Itjen KKP yang bertugas untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan perkarantinaan dan mutu hasil perikanan, Stasiun KIPM Cirebon menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran diawasi secara berkala oleh Itjen KKP untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM berkualitas dengan biaya yang sekecil mungkin.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2025, diketahui bahwa dari 15 IKU yang ditetapkan sebagai hasil program BPPMHKP, sebanyak 8 IKU dapat dicapai melebihi target ($> 110\%$) dan 7 IKU lainnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Dengan capaian IKU tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 yang ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai $113,48\%$ atau di atas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, serta Dukungan Manajemen, terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh Kepala UPT beserta Tim Pengelola Kinerja Stasiun KIPM Cirebon.

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program Tahun 2025 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian output dan capaian kinerja organisasi (NPSS). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Cirebon dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 dapat dinilai efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil ($97,40\%$ dari seluruh anggaran) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja Output

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar $97,40\%$ sedangkan capaian output dari masing-masing kegiatan mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar $2,6\%$ dalam menghasilkan output dengan optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi Tahun 2025, diketahui bahwa sumber daya anggaran Stasiun KIPM Cirebon digunakan secara efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil ($98,09\%$) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: $113,48\%$). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar $16,08\%$ ($= \text{NPSS} - \% \text{Input}$).

Tabel 19. Efisiensi Anggaran Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 per jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran (Input)	Realisasi Hasil		Efisiensi
97,40% dari alokasi anggaran Rp9.585.116.904,00	Output	100%	2,60 %
	Kinerja Organisasi (NPSS)	113,48%	16,08%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas yang berazas efisien, efektif, dan berdasarkan skala prioritas. Efisiensi juga diperoleh dari tercapainya target indikator kinerja pada beberapa kegiatan melebihi dari target yang ditetapkan dengan anggaran yang tersedia.

G. ANALISA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisa keberhasilan pencapaian target kinerja

1. Perencanaan kegiatan disusun secara terarah dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan CBIB, CPIB, CPIB di atas Kapal, CPPIB, CPOIB, SKP, HACCP dan SMKHP mengacu pada pedoman teknis dan regulasi yang berlaku.
3. Sosialisasi secara terus menerus dengan pemilik kapal, ABK dan tokoh nelayan.
4. Koordinasi dan sinergi dengan pelaku usaha serta pemangku kepentingan berjalan efektif.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Justifikasi Sisa Anggaran

Terdapat anggaran belanja pegawai (akun 51) berupa gaji pegawai PPPK Paruh Waktu dan uang lembur PPPK Paruh Waktu dari 12 pegawai (SKIPM Cirebon dan SKIPM Bandung) sejumlah Rp180.000.000,00 yang tidak dapat terserap dikarenakan aplikasi GPP belum dapat mengakomodir pembayaran gaji dan lembur PPPK Paruh Waktu. Pembayaran dilakukan menggunakan akun belanja barang (52) pada komponen keperluan perkantoran.

Capaian Sistem Manajemen Mutu Integrasi Tahun 2025

1. Re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan ruang lingkup Surveilance HACCP dan Inspeksi CPIB Kapal
2. Witnessing SNI ISO/IEC 17020:2012 untuk ruang lingkup baru Inspeksi CPIB Kapal

3. Sertifikasi ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup : sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, survailen HACCP dan pelayanan laboratorium

4. Uji Profisiensi Laboratorium Pengujian LP-541-IDN untuk ruang lingkup Salmonella, E.coli dan ALT dengan hasil seluruhnya INLIER

5. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier

* Target : 3 Supplier

* Realisasi : 13 Supplier

6. Scanning CE-137

* Realisasi :

1. Scanning : 3 Cont ekspor, 3 steorofoam ekspor sample

2. SMKHP bebas Cesium sebanyak : 2 SMKHP (1 cont + 1 ekspor sample)

3. Suket LHU : 2

7. Profilling pemindangan

* Realisasi :

1. 1 Poklahsar Pemindang kab.Cirebon

2. 1 Poklahsar Pemindang kab. Indramayu

Capaian kinerja strategis lainnya :

1. Piagam penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat INFORMATIF dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan tahun 2025

2. Piagam penghargaan Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester 1 Tahun 2025 lingkup KPPN Cirebon

3. SAKIP mendapat nilai A

4. SKM Triwulan IV Tahun 2025 mendapat nilai 90,86

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Cirebon mulai awal tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan dan target tahun sebelumnya, serta target akhir perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 kategori **Istimewa**. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai **113,48**.
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan rata-rata capaian empat Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 15 IKU. Dari 15 IKU tersebut, sebanyak 8 IKU dapat dicapai melebihi target (capaian >100%) dan 7 IKU tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian = 100%).
3. Beberapa capaian kinerja yang mendapatkan nilai positif dalam mendukung kinerja BPPMHKP dan KKP pada Tahun 2025, antara lain (a) Stasiun KIPM Cirebon ditetapkan sebagai salah satu UPT yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP pada Tahun 2021; (b) sampai dengan saat ini Stasiun KIPM Cirebon dapat mempertahankan sertifikasi ISO dan mengimplementasikan ISO secara terintegrasi yaitu ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017, dan ISO 9001:2015; (c) Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM kategori tinggi; (d) Persentase penyelesaian temuan BPK mencapai 100%; (e) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mencapai 120%; (f) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >90; (g) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) yang melebihi 90; dan (h) Nilai

Penilaian Mandiri Sistem AKIP Stasiun KIPM Cirebon dengan Predikat A (nilai terbaik di lingkup BPPMHKP).

4. Dari sisi kinerja keuangan, Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.585.116.904,00 atau 97,40% dari pagu anggaran revisi yang dikelola yaitu sebesar Rp9.841.258.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp256.141.096 atau 2,6%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 93,86.

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon selama Tahun 2025, bahwa tidak seluruh sub kegiatan/sub komponen dan anggarannya dapat direalisasikan sebagaimana tercantum dalam RKA K/L TA 2025, hal tersebut karena :

1. Target PNBPN ditetapkan oleh Kemenkeu T-2 sehingga target PNBPN Tahun 2025 masih bergabung dengan target PNBPN Karantina.
2. Terhambatnya ekspor udang ke Amerika akibat kontaminasi Cs-137.
3. Tidak lagi menarik PNBPN dari Uji Organoleptik

Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan PNBPN dilingkup Stasiun KIPM Cirebon yang hanya mencapai Rp56.094.000,00 atau 8,84% dari target Rp640.270.000,00. Dengan tidak tercapainya target PNBPN maka beberapa kegiatan yang bersumber dana dari PNBPN tidak dapat direalisasikan secara optimal.

C. RENCANA PERBAIKAN TAHUN MENDATANG

Meningkatkan nilai efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan meningkatkan IP ASN untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai.

D. TINDAK LANJUT RENCANA PERBAIKAN TAHUN SEBELUMNYA

Saran rencana perbaikan Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2024 adalah **mempertimbangkan secara selektif dalam menyusun anggaran kegiatan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian output organisasi**. Atas rencana perbaikan tersebut, berikut tindak lanjut yang telah diselesaikan pada Tahun 2025, yaitu telah disusun dokumen perencanaan anggaran kegiatan dengan menyesuaikan perubahan SOTK BPPMHKP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan utama dan pencapaian kinerja organisasi sebagaimana RKT dan RKA K/L Tahun 2025 pada Lampiran 2 dan 3.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Rudi Barmara
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Cirebon



Ditandatangani
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN CIREBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	82
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	3,36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9.453.341.000
2.	Manajemen Mutu	348.080.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	278.547.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025		10.079.968.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Cirebon



Ditandatangani
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025

STASIUN KIPM CIREBON



KATA PENGANTAR

Kinerja suatu unit kerja/organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi atas pencapaian yang telah ditargetkan oleh unit kerja tersebut pada periode waktu tertentu. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan unit organisasi di lingkup KKP dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi yang baru terutama di bidang primer dan pasca panen disusunlah revisi rencana aksi kegiatan. Rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerjanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 ini. Kami sangat berkenan jika ada masukan/saran yang membangun dalam rangka perbaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini, dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.



Cirebon, 3 Februari 2025
Kepala,

R. Rudi Barmara, S.Pi, M.P.
NIP 19690414 199203 1 005

RENCANA AKSI

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Bulanan											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan	8,160,000	Sertifikat	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Sertifikasi CPIB pada Pembenihan	8,160,000	Sertifikat	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Sertifikasi CPPIB	18,720,000	Sertifikat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	18,720,000	Sertifikat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan	87,120,000	Sertifikat	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	30,000,000	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	43,280,000	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	3 Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Perjalanan dinas pengambilan contoh uji	6,000,000	Laporan	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
			Biaya uji banding ke laboratorium rujukan	4,100,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			Belanja bahan dan perlengkapan pengawasan mutu hasil perikanan domestik	14,900,000	Paket	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan												
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi	37,200,000	Dokumen	4	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Pengelolaan PBJ	553,316,000	Laporan	7	-	-	1	1	4	4	4	5	5	6	7	7
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penilaian Mandiri SAKIP dan Maintenance WBK	14,760,000	Laporan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Bahan Perlengkapan Pelayanan	12,000,000	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengelolaan data dan informasi	25,080,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Cirebon, 3 Februari 2025
Kepala SKIPM Cirebon

R. Rudi Barmara

R. Rudi Barmara, S.Pi., M.P.
NIP. 19690414 199203 1 005